

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DARI PERSPEKTIF PENERIMA MANFAAT DI KOTA
BANDAR LAMPUNG WILAYAH KEDATON**

Tugas Ujian Tengah Semester MPAP

Oleh

**ABYAS FACHRI EFENDI
NPM 2416041080**



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Teori Kebijakan Publik	13
2.2.2 Teori <i>Street-Level Bureaucracy</i>	15
2.2.3 <i>Good Governance</i>	16
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	17
3.1 Tipe Penelitian.....	17
3.2 Fokus Penelitian	18
3.3 Lokasi Penelitian	20
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6 Teknik Analisis Data	24
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	25
DAFTAR PUSTAKA	27

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial. Program ini berorientasi pada pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH hadir sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang bersifat multidimensi, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan (Rahman & Widodo, 2020).

Dalam konteks pembangunan nasional, PKH merupakan bagian integral dari strategi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan pertama dan ketiga, yaitu pengentasan kemiskinan (No Poverty) dan peningkatan kesejahteraan (Good Health and Well-Being). Melalui pemberian bantuan bersyarat, pemerintah berupaya menciptakan perilaku sosial positif seperti peningkatan angka kehadiran sekolah anak dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Dengan demikian, PKH bukan sekadar bantuan ekonomi, tetapi juga intervensi sosial yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi (Fitrinitia, 2023).

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki dinamika sosial yang kompleks. Laju urbanisasi yang tinggi, kesenjangan sosial ekonomi, serta ketimpangan distribusi pendapatan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), angka kemiskinan di Bandar Lampung mencapai 9,12%, dengan sebagian besar masyarakat berprofesi di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya

kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak ekonomi, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Kedaton. Wilayah Kedaton dikenal sebagai kawasan yang cukup padat dengan keberagaman sosial ekonomi penduduknya. Banyak keluarga di wilayah ini bergantung pada pekerjaan sektor informal seperti buruh, pedagang kecil, dan pekerja harian. Situasi ini menjadikan Kedaton sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang tinggi, sehingga pelaksanaan PKH di wilayah ini menjadi penting untuk ditelaah lebih dalam. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat Kedaton mengakses layanan publik serta meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat (Utami, 2021).

Namun demikian, pelaksanaan PKH di lapangan sering kali menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan yang muncul di antaranya terkait ketepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan pencairan dana, hingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban yang melekat pada program ini. Tidak jarang ditemukan kasus di mana penerima bantuan tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan namun masih terdaftar sebagai peserta, atau sebaliknya, masyarakat miskin yang belum memperoleh bantuan karena persoalan administratif (Sasmita, 2023).

Selain itu, aspek komunikasi antara pendamping sosial dan penerima manfaat sering kali menjadi kendala dalam implementasi PKH. Pendamping sosial memiliki peran vital dalam memastikan bahwa bantuan tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku sosial penerima. Namun, dalam praktiknya, jumlah pendamping sering kali tidak sebanding dengan jumlah keluarga penerima manfaat. Hal ini menyebabkan proses pendampingan kurang optimal, sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap penerima bantuan tidak berjalan maksimal (Komarawati, 2025).

Kendala lain yang sering muncul adalah rendahnya literasi kebijakan di

kalangan penerima manfaat. Sebagian penerima bantuan menganggap PKH sebagai bentuk bantuan karitatif tanpa kewajiban tertentu, bukan sebagai program pemberdayaan berbasis tanggung jawab sosial. Akibatnya, tingkat partisipasi dalam kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil, imunisasi anak, dan kehadiran sekolah menjadi kurang konsisten. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya bergantung pada alokasi dana, tetapi juga pada kesadaran sosial penerima manfaat terhadap tujuan program (Nurkhalim et al., 2022).

Dari perspektif tata kelola pemerintahan (governance), efektivitas pelaksanaan PKH mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengimplementasikan kebijakan pusat secara adaptif. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu memastikan koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, dan lembaga pendidikan serta kesehatan agar pelaksanaan PKH tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam memberdayakan masyarakat miskin. Ketidaksinergian antar lembaga sering kali menjadi hambatan dalam penyampaian manfaat program secara optimal (Pratama & Suryani, 2022).

Dalam konteks wilayah perkotaan seperti Kedaton, dinamika sosial masyarakat juga mempengaruhi cara penerima manfaat memaknai program bantuan. Masyarakat urban memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pedesaan, terutama dalam hal kebutuhan ekonomi, mobilitas sosial, serta tekanan hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendekatan pelaksanaan PKH di wilayah perkotaan perlu mempertimbangkan karakteristik khusus ini agar kebijakan dapat diterima secara efektif dan tepat sasaran (Fitrinitia, 2023).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini sangat relevan karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan interpretasi penerima manfaat terhadap pelaksanaan PKH. Dengan metode wawancara mendalam dan observasi,

peneliti dapat memahami realitas sosial yang terjadi di lapangan secara kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya menilai keberhasilan program dari sisi administratif, tetapi juga dari bagaimana penerima manfaat merasakan dampak program terhadap kehidupan sehari-hari mereka (Utami, 2021).

Dari sisi sosial, keberhasilan PKH sangat ditentukan oleh sejauh mana program mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Jika penerima hanya bergantung pada bantuan tanpa adanya perubahan perilaku produktif, maka tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pelaksanaan PKH harus disertai dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah (Rahman & Widodo, 2020).

Dalam praktiknya, pemerintah telah berupaya memperkuat aspek pemberdayaan melalui program pendampingan keluarga sejahtera dan pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat. Namun, efektivitas upaya ini masih belum optimal di beberapa wilayah, termasuk Kedaton. Hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan tenaga pendamping, dan rendahnya koordinasi antar instansi sering kali menjadi faktor penghambat. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PKH dari perspektif penerima manfaat itu sendiri (Sasmita, 2023).

Selain dimensi sosial dan administratif, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PKH juga patut dikaji. Persepsi publik terhadap keadilan distribusi bantuan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan dalam proses seleksi penerima manfaat dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah dan memunculkan potensi konflik sosial di tingkat lokal (Pratama & Suryani, 2022).

Kecamatan Kedaton menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti karena karakteristik masyarakatnya yang heterogen dan memiliki tingkat penerimaan bantuan sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap persepsi penerima manfaat menjadi kunci untuk mengetahui sejauh mana program ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Evaluasi dari perspektif penerima dapat mengungkap apakah bantuan tersebut memberikan perubahan signifikan terhadap kualitas hidup, atau justru menimbulkan ketergantungan baru di masyarakat (Komarawati, 2025).

Penelitian ini juga relevan untuk menilai sejauh mana prinsip *good governance*—seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas—telah diterapkan dalam pelaksanaan PKH di tingkat lokal. Prinsip-prinsip tersebut merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan kebijakan publik. Pelaksanaan program sosial yang baik tidak hanya menyalurkan bantuan secara merata, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Nurkhalim et al., 2022).

Selain berkontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, penelitian ini juga memiliki nilai praktis yang tinggi. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan program bantuan sosial agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas PKH di masa mendatang melalui penguatan kapasitas pendamping sosial dan optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi (Sasmita, 2023).

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung wilayah Kedaton menjadi cerminan bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam konteks lokal yang dinamis. Dengan mengkaji pelaksanaan program dari sudut pandang penerima manfaat, penelitian ini berupaya menggali

realitas sosial yang terjadi di lapangan secara mendalam. Pendekatan ini penting untuk memahami bahwa kebijakan publik tidak hanya dinilai dari hasil makro, tetapi juga dari dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat penerima.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat paradigma kebijakan sosial berbasis bukti (evidence-based policy) dan memperkaya literatur akademik mengenai evaluasi program perlindungan sosial di Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, PKH tidak hanya menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sarana transformasi sosial menuju kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin di perkotaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung wilayah Kedaton berdasarkan perspektif penerima manfaat?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di wilayah Kedaton?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung wilayah Kedaton dengan meninjau aspek implementasi kebijakan serta persepsi penerima manfaat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diarahkan untuk memahami sejauh mana pelaksanaan PKH telah berjalan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang

ditetapkan oleh pemerintah, serta bagaimana pelaksana di lapangan seperti pendamping sosial dan aparat daerah menjalankan perannya dalam mendukung keberhasilan program. Penelitian ini juga berupaya menggali persepsi penerima manfaat terhadap pelaksanaan PKH, terutama terkait keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di wilayah Kedaton.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan PKH, baik dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal serta dampaknya terhadap kesejahteraan penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian administrasi publik, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung, khususnya wilayah Kedaton.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dan efektivitas program kesejahteraan sosial. Melalui analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dari perspektif penerima manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika hubungan antara kebijakan pemerintah dan realitas sosial di tingkat lokal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis mengenai model implementasi kebijakan berbasis masyarakat, yang menekankan pentingnya

partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sosial.

Selain itu, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks pemerintahan daerah, terutama dengan menyoroti peran aktor lokal dan penerima manfaat sebagai bagian integral dari keberhasilan kebijakan publik. Temuan yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keterpaduan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas wawasan akademik tentang administrasi publik, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat literatur empiris terkait efektivitas kebijakan sosial di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan pendamping Program Keluarga Harapan di wilayah Kedaton, dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran PKH di lapangan, serta membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja implementasi. Dengan memahami perspektif penerima manfaat, pemerintah dapat menyesuaikan strategi pelaksanaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat penerima bantuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat sebagai penerima manfaat yang diharapkan memperoleh pelayanan publik yang lebih responsif dan berkeadilan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang menjadi landasan teoritis bagi penelitian mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung wilayah Kedaton. Tinjauan pustaka disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep, teori, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui kajian literatur ini, peneliti berupaya mengaitkan antara teori implementasi kebijakan publik, konsep program kesejahteraan sosial, dan perspektif penerima manfaat dalam konteks kebijakan perlindungan sosial di Indonesia.

Selain itu, tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memperkuat dasar analisis dalam penelitian, sehingga hasil yang diperoleh memiliki pijakan teoritis yang jelas dan relevan. Dalam bab ini juga akan diuraikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, baik yang dilakukan di tingkat nasional maupun daerah. Kajian terhadap penelitian terdahulu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi penelitian ini di antara penelitian sebelumnya, serta menunjukkan kontribusi baru yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Bagian pertama adalah penelitian terdahulu yang menjadi rujukan serta perbandingan dalam penelitian ini. Bagian kedua adalah landasan teori dan konsep. Bagian terakhir adalah kerangka berpikir penelitian yang menggambarkan alur logis hubungan antara teori, konsep, dan fokus penelitian.

2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi
Analisis Efektivitas Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur	Linda Oktaviani & Ivan Budi Susetyo	2021	Pelaksanaan PKH berjalan efektif tetapi belum optimal karena ada indikator yang belum terpenuhi.	Menjadi pembanding dengan konteks kota besar yang mirip dengan Bandar Lampung.
Implementation of Family Hope Program (PKH): Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH)	Miftahul Jannah & Isnaini Rodiyah	2022	Menggunakan model eksekusi kebijakan menemukan kelemahan pada SDM, akses fasilitas, dan kesadaran masyarakat.	Relevan dengan fokus penelitian pada implementasi dan persepsi penerima manfaat.
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan	Chairika Nasution, Kgs. M. Sobri,	2023	Pelaksanaan PKH dikaji menggunakan teori Van	Relevan untuk perbandingan implementasi

Harapan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan	Azhar, & Abdul Najib		Meter & Van Horn dan menunjukkan keberhasilan parsial dalam implementasi.	PKH di konteks perkotaan seperti Kedaton.
--	----------------------------	--	--	---

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian ini sekaligus memperluas wawasan pengetahuan peneliti. Dengan mempelajari penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menghindari adanya kesamaan topik dan lebih fokus dalam memperkaya kajian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk menemukan kekuatan maupun kelemahan penelitian sebelumnya sehingga dapat diisi oleh penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, kajian penelitian terdahulu menjadi sangat penting dalam menyusun kerangka konseptual dan metodologis penelitian ini. Berdasarkan perbandingan dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada tabel di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya sama-sama membahas mengenai kebijakan PKH dan pengaruhnya terhadap masyarakat, baik dalam aspek implementasi maupun efektivitasnya. Persamaannya terletak pada fokus penelitian yang menilai sejauh mana program PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian ini berbeda karena berjudul “ analisis pelaksanaan program keluarga harapan (pkh) dari perspektif penerima manfaat di kota bandar lamping wilayah kedaton “ sehingga hasil penelitian ini belum tentu sama dengan penelitian sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Teori berfungsi memberikan kerangka berpikir yang sistematis sehingga penelitian memiliki pijakan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu grand theory, middle theory, dan applied theory. Grand theory diposisikan sebagai kerangka konseptual besar untuk memahami fenomena kebijakan publik. Middle theory digunakan sebagai jembatan antara teori besar dengan praktik di lapangan. Sementara itu, applied theory berfungsi sebagai alat analisis praktis yang membantu peneliti dalam menelaah secara lebih spesifik implementasi kebijakan bantuan sosial di Kota Bandar Lampung wilayah Kedaton.

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dinilai efektivitasnya. Kebijakan publik tidak hanya sebatas keputusan pemerintah, tetapi juga proses sosial yang melibatkan interaksi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), teori ini membantu menjelaskan sejauh mana kebijakan sosial dijalankan sesuai dengan tujuan dan bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Menurut (Sugiyono, 2021), pemahaman menyeluruh terhadap proses implementasi kebijakan sangat diperlukan agar kebijakan publik dapat mencapai keadilan dan efektivitas sosial.

Tahap implementasi sering dianggap sebagai fase paling menentukan dari keberhasilan kebijakan publik. Teori implementasi, seperti yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn (Komarawati, 2025), menekankan pentingnya standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial yang memengaruhi pelaksanaan. Dalam

konteks PKH, hal ini berkaitan dengan sejauh mana aparaturnya dan pendamping sosial mampu menjalankan kebijakan sesuai ketentuan serta beradaptasi dengan kondisi masyarakat Kedaton.

Selain itu, pendekatan street-level bureaucracy dari Lipsky menyoroti peran pelaksana di lapangan yang sering kali harus menyesuaikan kebijakan dengan realitas sosial masyarakat (Gofen, 2021). Dalam PKH, pendamping sosial berperan penting sebagai penghubung antara kebijakan dan penerima manfaat. Pemahaman terhadap dinamika ini membantu menilai efektivitas dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan.

Konsep policy capacity juga penting untuk dianalisis, karena menggambarkan kemampuan institusi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. menekankan bahwa kapasitas kebijakan mencakup sumber daya manusia, sistem informasi, dan legitimasi sosial. Dalam pelaksanaan PKH, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan penyaluran bantuan dan kualitas layanan terhadap masyarakat miskin.

Selain itu, pendekatan implementation science menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti melalui pemantauan dan evaluasi berkelanjutan (Komarwati, 2025). Dengan penerapan prinsip ini, pelaksanaan PKH dapat diperbaiki secara adaptif sesuai hasil evaluasi dan masukan penerima manfaat. Sejalan dengan itu, lainnya menegaskan bahwa kebijakan transfer tunai bersyarat juga berfungsi memperkuat legitimasi sosial dan politik, sehingga persepsi penerima manfaat menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan kebijakan.

(Yuliani, 2024) menemukan bahwa efektivitas program seperti PKH sangat dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, teori kebijakan publik memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis pelaksanaan PKH dari sisi implementasi, peran pelaksana,

kapasitas kelembagaan, serta persepsi penerima manfaat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh dan rekomendasi praktis dalam peningkatan kualitas kebijakan sosial di wilayah Kedaton.

2.2.2 Teori *Street-Level Bureaucracy*

Teori *Street-Level Bureaucracy* yang dikemukakan oleh Lipsky menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat bawah memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang memiliki ruang diskresi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat (Lipsky, 2020). Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping sosial merupakan contoh nyata dari *street-level bureaucrats* yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Pelaksana kebijakan sering kali bekerja dalam kondisi terbatas baik dari sisi sumber daya, waktu, maupun beban kerja sehingga mereka mengembangkan strategi adaptif dalam menafsirkan kebijakan dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat (Ellis, 2021). Kondisi ini dapat menimbulkan variasi pelaksanaan di lapangan, tetapi sekaligus mencerminkan upaya pelaksana untuk menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan penerima manfaat. Dalam kasus PKH di Kedaton, hal ini terlihat dari cara pendamping sosial melakukan sosialisasi, verifikasi, dan pembinaan terhadap keluarga penerima program.

Kualitas hubungan antara pelaksana kebijakan dan masyarakat penerima menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik. Hubungan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik, sementara kurangnya komunikasi dapat menurunkan efektivitas program. Oleh karena

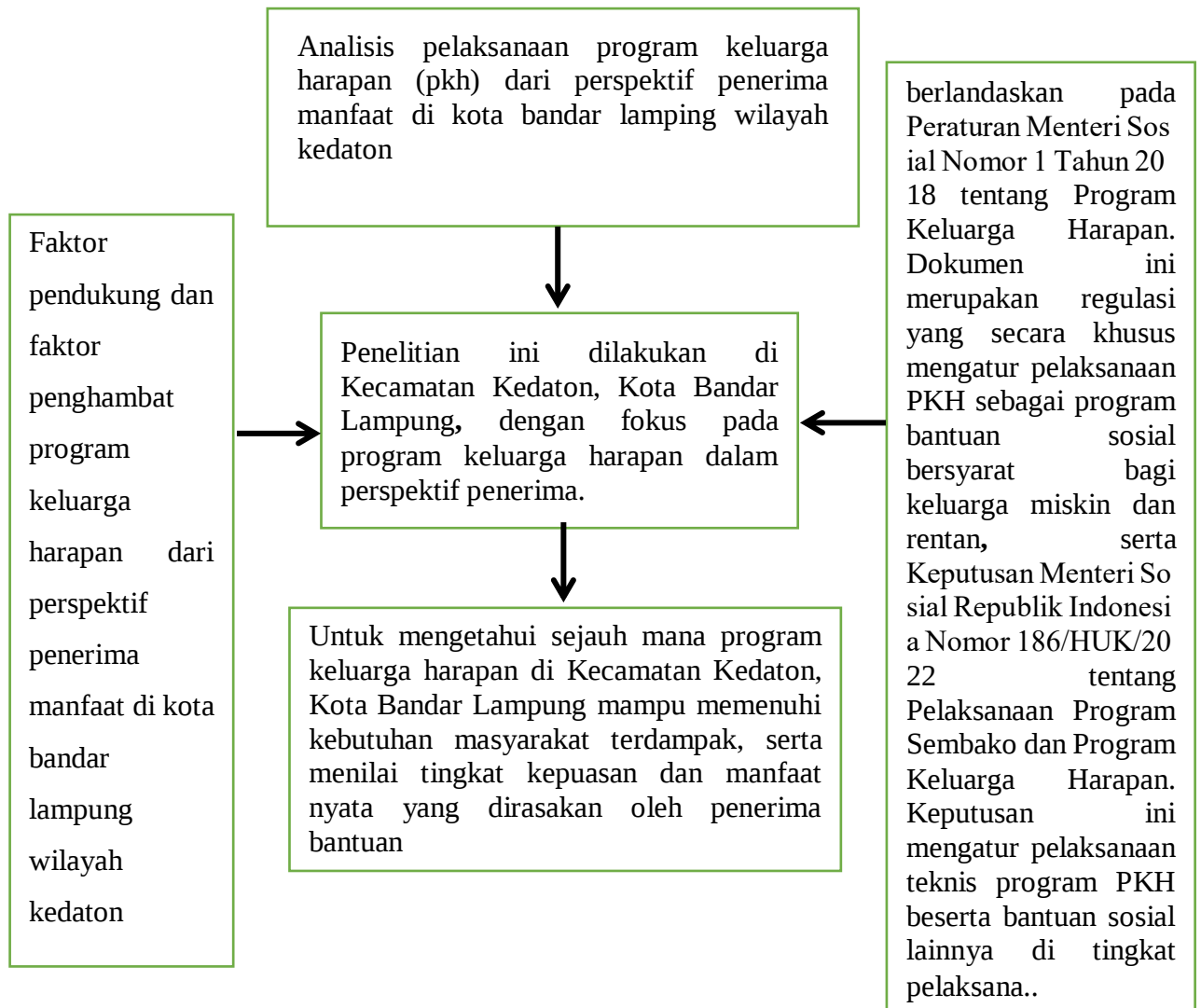
itu, teori Street-Level Bureaucracy relevan digunakan untuk menilai bagaimana perilaku, keputusan, dan interaksi pendamping sosial memengaruhi persepsi dan kepuasan penerima manfaat dalam pelaksanaan PKH. (sugiyono, 2021)

Teori ini juga membantu menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan dan alokasi anggaran, tetapi juga oleh kapasitas manusia yang menjalankannya di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, teori Street-Level Bureaucracy digunakan untuk memahami dinamika hubungan antara pendamping sosial dan penerima manfaat PKH, serta bagaimana proses tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

2.2.3 Good Governance

Sebagai teori terapan, penelitian ini menggunakan konsep good governance yang diperkenalkan oleh UNDP (1997). Good governance menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana kebijakan publik, termasuk bantuan sosial, dapat dijalankan secara baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam penelitian terbaru, prinsip good governance sering digunakan untuk menilai efektivitas program bantuan sosial. Timon (2021) menegaskan bahwa akuntabilitas dan keadilan sosial harus menjadi landasan utama dalam pemberian bantuan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, good governance dijadikan applied theory dalam penelitian ini, karena teori ini langsung digunakan untuk menganalisis permasalahan implementasi bansos, khususnya terkait transparansi data penerima, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian



3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan cara kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dengan mendalam bagaimana pandangan dan pengalaman masyarakat yang mendapatkan bantuan terhadap program keluarga harapan untuk masyarakat di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Cara ini dipilih karena cocok untuk menunjukkan fenomena sosial seperti apa adanya berdasarkan pengalaman nyata dari

informan tanpa campur tangan dari peneliti. Dengan metode ini, peneliti berusaha mengerti bagaimana program bantuan sosial dilaksanakan, bagaimana penerima bantuan menilai seberapa tepat bantuan itu diberikan, serta seberapa efektif program ini membantu. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan situasi sosial apa adanya dan menyajikannya dalam penjelasan yang mendetail. Metode ini tidak menggunakan analisis angka, tetapi lebih menekankan pada makna, pandangan, dan pengalaman hidup para penerima bantuan sosial. penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana kebijakan publik terlihat dari sudut pandang masyarakat yang terkena dampak secara langsung.

metode deskriptif kualitatif juga dianggap tepat karena fokus pada proses sosial dan konteks di mana kebijakan publik dijalankan. Dalam penelitian ini, peneliti berhubungan langsung dengan masyarakat Kedaton untuk memahami pendapat mereka tentang keadilan, keterjangkauan, dan relevansi bantuan yang mereka terima. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang dibangun oleh orang-orang tentang fenomena sosial tertentu melalui interaksi dan penafsiran. Oleh karena itu, pendekatan ini membantu peneliti melihat realitas sosial dengan cara yang lebih manusiawi dan kontekstual, sesuai dengan tujuan penelitian untuk menilai pelaksanaan program bantuan sosial

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dengan titik perhatian utama pada pandangan dan pengalaman penerima manfaat. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana masyarakat menilai pelaksanaan program bantuan sosial, baik dari segi ketepatan sasaran, ketepatan waktu, maupun kesesuaian bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Melalui fokus ini, penelitian berupaya

menggambarkan sejauh mana program tersebut benar-benar membantu pemulihan kehidupan masyarakat pasca-banjir serta mencerminkan peran negara dalam memberikan perlindungan sosial. Secara lebih terarah, fokus penelitian ini mencakup beberapa aspek pokok sebagai berikut:

- A. Ketepatan sasaran bantuan sosial, yaitu sejauh mana penerima bantuan merupakan masyarakat yang benar-benar terdampak dan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
- B. Ketepatan waktu penyaluran bantuan, yang menyoroti kecepatan dan kesiapan pemerintah dalam mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak bencana.
- C. Kesesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan masyarakat, yakni bagaimana bentuk bantuan yang diberikan (sembako, uang tunai) disesuaikan dengan kebutuhan nyata penerima di lapangan.
- D. masyarakat terhadap keadilan dan keterbukaan distribusi bantuan, meliputi pandangan warga mengenai transparansi, pemerataan, dan sikap aparat dalam pelaksanaan program.
- E. kepuasan penerima manfaat, yang mencerminkan seberapa besar bantuan sosial tersebut dianggap bermanfaat.

Melalui kelima fokus tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas kebijakan dari sisi pelaksanaannya, tetapi juga menggali makna sosial dan pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas penyelenggaraan program keluarga harapan di wilayah Kedaton, baik dari aspek kebijakan publik maupun dari realitas sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2019), penentuan fokus dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pedoman utama agar peneliti dapat menggali fenomena secara mendalam dan tetap berada dalam batas permasalahan yang relevan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini disusun berdasarkan konteks sosial, kebijakan, dan pengalaman nyata masyarakat

penerima bantuan sosial di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, tepatnya pada wilayah RT 001 RW 001. Lokasi ini dipilih karena merupakan kawasan padat penduduk dengan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang cukup tinggi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah ini beragam, baik dari segi tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun akses terhadap layanan publik, sehingga dianggap representatif untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan PKH di lingkungan perkotaan (Pratama & Yuliani, 2023).

Pelaksanaan PKH di Kedaton menghadapi tantangan seperti validitas data penerima, koordinasi antarinstansi, dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan program. Menurut Palili, Indriasari, dan Mendrofa (2024), efektivitas PKH di daerah perkotaan sering dipengaruhi oleh akurasi data serta pengawasan terhadap penggunaan bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana PKH di Kedaton telah berjalan sesuai dengan prinsip dan tujuan kebijakan.

Selain itu, peran pendamping sosial menjadi kunci keberhasilan implementasi PKH di lapangan. Jannah dan Rodiyah (2022) menjelaskan bahwa kinerja pendamping sosial berpengaruh besar terhadap keberhasilan penerima manfaat dalam memenuhi kewajiban program. Hal ini sejalan dengan temuan Haliim dan Purba (2021), yang menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan sosial.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting. Sawitri dan Rahmat (2022) menekankan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan bergantung pada keterlibatan aktif penerima manfaat. Dalam konteks Kedaton, hal ini tercermin dari upaya penerima untuk memahami dan

menjalankan kewajiban dalam program. Selain itu, Togola, Pandie, dan Say Rani (2024) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan di tingkat akar rumput sangat dipengaruhi oleh birokrasi lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, Kecamatan Kedaton menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti pelaksanaan PKH dari perspektif penerima manfaat.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang keduanya berperan penting dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Pemilihan dua sumber data ini dimaksudkan agar hasil penelitian memiliki kedalaman informasi sekaligus keakuratan dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penerima manfaat PKH, pendamping sosial, dan aparat kelurahan yang berperan dalam implementasi program. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti menggali pemahaman, persepsi, serta pengalaman informan terhadap pelaksanaan program, termasuk manfaat dan kendala yang muncul di lapangan. Menurut Sugiyono (2022), data primer merupakan sumber utama yang memberikan gambaran faktual tentang fenomena sosial yang diteliti dan menjadi dasar dalam membangun interpretasi atas realitas yang dihadapi masyarakat.

Selanjutnya, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara

semi-terstruktur, observasi, serta dokumentasi aktivitas penerima manfaat dan pendamping sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika pelaksanaan PKH di tingkat akar rumput. Data primer menjadi elemen penting dalam penelitian kualitatif karena menggambarkan pengalaman dan persepsi langsung dari informan, sehingga dapat memberikan pemaknaan yang lebih kontekstual terhadap kebijakan sosial yang sedang berjalan.

B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber resmi dan literatur pendukung yang relevan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sumber-sumber tersebut mencakup laporan tahunan Kementerian Sosial Republik Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, dokumen kebijakan pemerintah daerah, serta publikasi ilmiah yang membahas topik terkait implementasi kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer dan digunakan untuk memberikan kerangka konseptual, historis, dan faktual yang memperkuat analisis hasil penelitian.

Selain itu, data sekunder membantu peneliti memahami konteks kebijakan secara lebih luas serta melakukan triangulasi terhadap temuan yang diperoleh di lapangan. Penggunaan data sekunder memungkinkan hasil penelitian menjadi lebih objektif dan sistematis, karena informasi yang diperoleh dapat dibandingkan dengan data resmi dan temuan penelitian terdahulu. Dengan demikian, kombinasi antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan PKH dari perspektif penerima manfaat di wilayah Kedaton, Kota Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari para informan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali jawaban yang mendalam dan fleksibel sesuai dengan situasi lapangan. Informan terdiri dari penerima manfaat, pendamping sosial, serta aparat kelurahan yang memiliki peran dalam implementasi program. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memahami pandangan, persepsi, dan pengalaman mereka terhadap pelaksanaan PKH di wilayah Kedaton.

b. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan interaksi antara pelaksana program dan penerima manfaat di lingkungan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai kondisi sosial, pola komunikasi, serta dinamika pelaksanaan program di tingkat lokal. Hasil observasi membantu peneliti dalam memahami konteks nyata pelaksanaan PKH, termasuk bagaimana kebijakan dijalankan dan diterima oleh masyarakat di wilayah Kedaton.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi dengan data tertulis atau visual yang relevan. Dokumen yang dikumpulkan meliputi laporan kegiatan PKH, data penerima manfaat, foto kegiatan lapangan, serta arsip administrasi dari kelurahan atau pendamping sosial. Data dokumentasi ini berfungsi

sebagai bukti pendukung dan memperkuat validitas temuan penelitian, serta membantu peneliti memahami kerangka pelaksanaan program secara lebih menyeluruh.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kedaton.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan agar relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan persepsi penerima manfaat, pelaksanaan program, serta kendala yang dihadapi oleh pelaksana PKH. Proses ini penting untuk menghilangkan data yang tidak relevan dan mempertajam analisis terhadap fenomena sosial yang diamati, sehingga diperoleh pemahaman yang terarah mengenai efektivitas implementasi program di tingkat lokal.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi, kutipan wawancara, serta ringkasan hasil observasi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika pelaksanaan PKH di Kedaton. Penyajian data ini memungkinkan

peneliti melihat pola hubungan antara pelaksana kebijakan dan penerima manfaat, serta menilai sejauh mana tujuan program tercapai berdasarkan pengalaman empiris masyarakat.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menelaah kembali keseluruhan data yang telah direduksi dan disajikan untuk memastikan keakuratan serta konsistensi temuan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan interpretasi terhadap makna dan kecenderungan yang muncul dari data lapangan, baik mengenai efektivitas, transparansi, maupun partisipasi penerima manfaat dalam program PKH. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin validitas hasil penelitian, sehingga kesimpulan yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi pelaksanaan PKH di wilayah Kedaton secara objektif dan mendalam.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kenyataan sosial di lapangan. Kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Keempat kriteria tersebut digunakan untuk menjaga agar data dan temuan penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta menggambarkan pengalaman penerima manfaat program bantuan sosial di lokasi penelitian.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini, kredibilitas dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara penerima manfaat, observasi langsung terhadap kegiatan pendamping sosial, serta

dokumen resmi dari pemerintah kelurahan. Selain itu, peneliti melakukan member checking dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan akurasi interpretasi data. Langkah ini penting agar hasil penelitian dapat dipercaya dan benar-benar merepresentasikan pengalaman nyata penerima manfaat PKH di wilayah Kedaton.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain yang memiliki karakteristik serupa. Dalam konteks ini, peneliti mendeskripsikan secara rinci kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat di Kecamatan Kedaton agar pembaca dapat menilai relevansi temuan dengan wilayah lain. Penyajian data yang kaya konteks memungkinkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap studi implementasi kebijakan sosial di daerah perkotaan lain yang memiliki struktur masyarakat sejenis.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas menekankan pada konsistensi hasil penelitian jika proses penelitian dilakukan kembali dalam kondisi yang sama. Untuk menjaga dependabilitas, peneliti menyusun catatan lapangan secara sistematis, mencatat seluruh proses wawancara, observasi, dan analisis data. Proses audit terhadap langkah-langkah penelitian dilakukan secara hati-hati agar setiap keputusan metodologis dapat ditelusuri dan dijustifikasi. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian mengenai pelaksanaan PKH di Kedaton memiliki ketepatan prosedural dan kestabilan hasil yang dapat diuji ulang.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas bertujuan untuk menjamin bahwa hasil penelitian

benar-benar bersumber dari data, bukan dari bias atau subjektivitas peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menjaga objektivitas dengan menyimpan seluruh data mentah, transkrip wawancara, dan dokumen pendukung sebagai bahan audit ilmiah. Selain itu, proses analisis dilakukan secara reflektif untuk meminimalkan pengaruh asumsi pribadi peneliti terhadap interpretasi hasil. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas pelaksanaan PKH sebagaimana dialami oleh penerima manfaat di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, C., Sobri, K. M., & Najib, A. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1374-1388.
- Oktaviani, L., & Susetyo, I. B. (2021). Analisis Efektivitas Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 307-318.
- Fitrinitia, I. S. (2023). Social protection for climate-disasters: A case study of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Indonesia. ScienceDirect.
- Pratama U. & Yuliani E. (2023). The Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) Policy in Improving the Welfare of Poor Families in Bayongbong Subdistrict, Garut Regency. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2). <https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.588>
- Nurkhalim, R. F., et al. (2022). Program Keluarga Harapan: Impact on prenatal visit and birth outcomes in Indonesia. *BMC Public Health*.
- Pratama, D. R., & Suryani, E. (2022). Transparency and accountability in social assistance distribution during the COVID-19 pandemic in

- Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 78–90.
- Rahman, A., & Widodo, S. (2020). Governance and implementation challenges of conditional cash transfer programs in Indonesia. *Journal of Social Policy and Development Studies*, 7(2), 55–67.
- Sasmita, O. A. (2023). Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan untuk Keluarga Penerima di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(2), 45–57.
- Utami, I. P. (2021). Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(1), 33–42.
- Oktaviani, L., & Susetyo, I. B. (2021). Analisis Efektivitas Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 307-318.
- Rodiyah, I. (2024). Implementation of Family Hope Program (PKH): Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1), 10-21070.
- Nasution, C., Sobri, K. M., & Najib, A. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1374-1388.
- Pratama, A. B. (2025). The Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) Policy in Improving the Welfare of Poor Families in Bayongbong Subdistrict, Garut Regency. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2), 325-331.
- Sari, C. I., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2024). Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sidomulyo Village, Stabat District Langkat Regency. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 3(1), 6980.
- Palili, M. G. I., Indriasari, R., & Mendrofa, D. E. K. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa

- Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 7746-7754.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13555>
- Jannah, M., & Rodiyah, I. (2022). Implementation of Family Hope Program (PKH): Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1), 1349.
<https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1349>
- Haliim, W., & Purba, D. (2021). Social and bureaucratic problems in social policy implementation in Indonesia: A study on the Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 7(1).
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4533>
- Sawitri, N., & Rahmat, W. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Pantai Harapan... *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 200. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.200>
- Togola, A. U., Pandie, D. B., & Say Rani, L. P. (2024). Akuntabilitas street-level bureaucracy dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Oesapa. *Jurnal Administrasi dan Demokrasi*, 1(1), 3567. <https://doi.org/10.35508/jad.v1i1.3567>
- Komarawati, K. (2025). Evidence from conditional cash transfer/PKH Indonesia: Qualitative insights on implementation and impact. *PubMed Central*.
- Sugiyono, D. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 33.
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Umsida Press, 1-237.
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88-92.
- Sager, F., & Gofen, A. (2022). The polity of implementation:

Organizational and institutional arrangements in policy implementation. *Governance*, 35(2), 347-364.

